

Manajemen Lembaga Pendidikan Nonformal dalam Mengimplementasikan Kebijakan Asesmen Nasional di PKBM Budi Utama Kota Surabaya

Dina Nurcahyani^{1*)}, Widodo²

¹²Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding author, e-mail: dinanurcahyani.19005@mhs.unesa.ac.id

Received Juli 2023;
Revised Juli 2023;
Accepted Juli 2023;
Published Online 2023

Abstrak: Masalah dalam penelitian ini yaitu kebijakan Asesmen Nasional merupakan kebijakan yang baru diluncurkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai lembaga pendidikan PKBM Budi Utama juga harus mengambil peran dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki akreditasi baik maka PKBM Budi Utama akan berhati-hati dalam mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan baru ini sehingga dibutuhkan manajemen yang dapat menyukkseskan dan memaksimalkan jalannya Asesmen Nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan AN dengan metode kualitatif. Subjek penelitian ini yakni direktur PKBM, staf lembaga, panitia ujian, dan peserta AN. Teknik pengumpulan data menggunakan teknis wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Setelah itu diuji nilai kebenarannya dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen dalam mengimplementasikan kebijakan AN berdasarkan teori yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kata Kunci: Manajemen Pendidikan Nonformal, Kebijakan, Asesmen Nasional

Abstract: The problem in this research is that the National Assessment policy is a policy that has just been launched to improve the quality of education as an educational institution CLC Budi Utama must also take a role in implementing the policy. As an institution that has good accreditation, CLC Budi Utama will be careful in preparing and implementing this new policy so that management is needed that can succeed and maximize the course of the National Assessment. The purpose of this study is to find out how the implementation of the management function which includes planning, organizing, implementing, and supervising the implementation of AN policy with qualitative methods. The subjects of this study were CLC directors, institutional staff, exam committees, and AN participants. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, and documentation. The techniques used in data analysis are data reduction, data presentation and verification. After that tested the truth value using triangulation techniques. The results of this study indicate that the management function in implementing AN policy is based on theory which includes planning, organizing, implementing, and supervising.

Keywords: *Management Nonformal Education, Policy, National Assessment*

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:
Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Gedung O-1 Lantai 2 Jalan Lidah Wetan
Sby Kode Pos 60213
Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112
E-mail: jpus@unesa.ac.id

Pendahuluan

Program belajar yang berkualitas selalu diperlukan evaluasi secara terus-menerus, bukan hanya pada hasil belajar peserta didik namun juga pada keseluruhan proses belajar mengajar sehingga akan mengetahui kelemahan dan kelebihan program yang dilaksanakan agar terciptanya pendidikan yang bermutu. Kegiatan evaluasi pendidikan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pemilihan media evaluasi akan mempengaruhi kejelasan ukuran keberhasilan pendidikan. Dengan begitu, dalam pelaksanaan evaluasi

seharusnya memegang prinsip untuk mendapatkan hasil yang akan jauh memperbaiki, sehingga tujuan untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih baik melalui evaluasi akan tercapai.

Sistem evaluasi pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional bab XVI pasal 57 hingga 59 (Pemerintah Indonesia, 2003) yang menyatakan bahwa dalam mengendalikan mutu pendidikan secara nasional dilaksanakan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Menurut (Novita, 2021) menjelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan di lembaga secara mandiri dan berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk mencapai standar nasional pendidik.

Salah satu bentuk evaluasi yang harus diberikan oleh satuan program pendidikan kesetaraan yaitu pelaksanaan Asesmen Nasional. Tujuan dari kebijakan Asesmen Nasional yaitu hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan profil Pendidikan daerah dan profil Pendidikan nasional. Asesmen Nasional diluncurkan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia yang tertinggal dibandingkan negara lain. Dengan begitu, hasil dari perbaikan tersebut diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang dapat bersaing di waktu yang akan datang.

Asesmen Nasional (AN) merupakan program penilaian terhadap mutu setiap satuan pendidikan untuk memetakan mutu pendidikan termasuk pada program pendidikan kesetaraan. Mutu satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik seperti literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar dan sesuatu yang mendukung pembelajaran. Hasil asesmen nasional menggambarkan kondisi, proses, dan hasil belajar pada tiap satuan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tiap sekolah dan daerah sehingga akan mempercepat perbaikan mutu pendidikan nasional (Novita, Mellyzar, & Herizal, Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru, 2021).

Tujuan dilaksanakannya Asesmen Nasional adalah untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan menghasilkan informasi sebanyak-banyaknya tentang keberhasilan siswa dalam pembelajaran, serta sebagai bahan perbaikan kualitas belajar mengajar yang diharapkan dapat berdampak pada karakter dan kompetensi peserta didik. Informasi-informasi tersebut kemudian dapat digunakan oleh tenaga pendidik sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan Tujuan dan manfaat Manajemen khususnya pada poin pertama, yakni terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) (Machali & Hamid, 2017).

Dengan begitu untuk memaksimalkan hasil belajar dalam menyiapkan asesmen nasional diperlukannya manajemen yang sesuai. Fungsi manajemen harus diterapkan dalam mengimplementasikan pelaksanaan asesmen nasional secara praktis karena dalam prosesnya hanya diberikan waktu persiapan yang singkat. Selain itu kegiatan Asesmen Nasional membutuhkan pemenuhan sumber daya manusia terampil IT, mesim serta material dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat. Manajemen satuan pendidikan kesetaraan yang baik maka akan membantu kinerja dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas maupun kegiatan yang bersifat mendadak ataupun banyak waktu untuk mempersiapkannya (Wildan, 2022).

Dalam mempersiapkan asesmen nasional, semua manajemen harus saling berkitan tidak dapat dipisahkan atau bahkan ada yang dihilangkan. Pada lembaga pendidikan nonformal di PKBM Budi Utama Kota Surabaya terdapat beberapa kendala dalam mempersiapkan asesmen nasional salah satunya dari segi sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana tentunya akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Asesmen Nasional tersebut. Kebutuhan akan sarana komputer yang diperlukan untuk mempersiapkan asesmen nasional tidak dimiliki oleh PKBM sehingga membuat lembaga tersebut harus memiliki solusi dan kerja sama yang baik agar dapat meminjam sarana seperti komputer kepada lembaga lain.

Selain itu, dari segi manajemen keuangan di PKBM Budi Utama Kota Surabaya yang termasuk lembaga nonformal tidak berprofit semua peserta didik dapat menempuh pendidikan di sini namun dalam mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional tidak segan untuk mengeluarkan dana secara mandiri demi keberhasilan peserta didiknya untuk mengikuti asesmen nasional. Tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan manajemen atau pengelolaan keuangan supaya tidak terjadi pembengkakan.

Manajemen dalam mengimplementasikan kebijakan asesmen nasional merupakan sebagai bentuk bahwa lembaga nonformal PKBM Budi Utama Kota Surabaya taat akan administrasi yang diberikan oleh

pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tidak sedikit lembaga nonformal yang termasuk lembaga nonprofit tidak melaksanakan asesmen nasional. Asesmen Nasional itu sendiri digunakan oleh PKBM Budi Utama Kota Surabaya sebagai tolok ukur akan kemampuan peserta didik dan sebagai dasar evaluasi proses belajar mengajar, karena di dalam asesmen nasional terdapat penilaian literasi dan numerasi (AKM), survei lingkungan, dan survei karakter. Selain itu PKBM Budi Utama harus lebih mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional sebagai kebijakan baru untuk dapat mempertahankan status yang telah dimiliki.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan & Taylor dalam (Moleong, 2003) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengetahui fenomena yang dapat dikualifikasikan dan berdifat deskripsi (Fitri & Haryanti, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan ini peneliti mengkaji perspektif partisipan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam, studi dokumentasi untuk mendapatkan data yang diinginkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah mengungkap adanya fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan serta memberikan keadaan yang sesuai apa adanya serta menganalisis dengan ditunjang suatu dokumen yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana manajemen lembaga pendidikan nonformal dalam mengimplementasikan kebijakan Asesmen Nasional di PKBM Budi Utama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Dalam teknik wawancara memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden (Sangadji & Sopia, 2010). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur untuk mendapatkan hasil yang mendalam. Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan salah satu bentuk wawancara tidak terstruktur dalam mengumpulkan data yang digali dari sumber langsung melalui tanya jawab dan percakapan secara *holistic* dan jelas dari informal menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti. Wawancara mendalam digunakan agar mendapatkan informasi atau data yang belum didapatkan dari observasi partisipatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Peneliti merencanakan akan mewawancarai Direktur PKBM, Waka Kurikulum, Panitia Ujian, Operator sekolah, tutor dan salah satu peserta didik yang mengikuti Asesmen Nasional. Dalam setiap wawancara peneliti mencoba menggali semua informasi mengenai fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti, yakni bagaimana manajemen lembaga pendidikan nonformal dalam mengimplementasikan kebijakan Asesmen Nasional di PKBM Budi Utama Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan mengumpulkan dan mengkoleksi data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan tahap teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yaitu model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama seperti *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Yang kemudian untuk menjamin keabsahan data yang telah didapatkan tersebut dengan teknik kredibilitas, dependabilitas, konfirmasi dan transferabilitas.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Manajemen Lembaga Pendidikan Nonformal Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Asesmen Nasional di PKBM Budi Utama Kota Surabaya yang meliputi empat tahap manajemen yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan yang dijabarkan sebagai berikut.

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan Asesmen Nasional berawal dari keputusan Kemendikbudristek yang kemudian muncul Surat Edaran (SE) Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional yang kemudian Surat Edaran tersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan sehingga keluarlah Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai acuan pelaksanaan Asesmen Nasional. POS tersebut disalurkan kepada seluruh kepala Dinas

Pendidikan dan lembaga lain yang melaksanakan proses pendidikan. Setelah Prosedur Operasional Standar (POS) dari Dinas Pendidikan Provinsi mencapai ditangan PKBM Budi Utama Kota Surabaya, maka dimulailah persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional. Berikut ini persiapan yang dilakukan PKBM Budi Utama dalam mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional:

- a. Persiapan diawali dengan sosialisasi kepada tutor-tutor oleh Direktur PKBM Budi Utama.
- b. Rapat koordinasi direktur PKBM beserta staf untuk menyusun tindakan yang akan dikerjakan.
- c. Kemudian dibuatlah panitia Asesmen Nasional PKBM Budi Utama Kota Surabaya agar bertanggung jawab dalam menyiapkan konsep serta kebutuhan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional.
- d. Selanjutnya yaitu mensosialisasikan pelaksanaan Asesmen Nasional kepada peserta didik dan wali peserta didik.

Perencanaan persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional di PKBM Budi Utama berawal dari mengidentifikasi pemahaman mengenai Asesmen Nasional. Kemudian pada perencanaan SDM yang ada. Sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional di PKBM Budi Utama Kota Surabaya. Dari segi pendidik, perencanaan yang dilakukan PKBM Budi Utama menghimbau kepada tutor untuk mengejar materi yang tertinggal sehingga tidak terjadi kebingungan peserta didik saat mengerjakan soal Asesmen Nasional. Kemudian dari segi sarana dan prasarana, PKBM Budi Utama belum memiliki komputer padahal itu sebagai alat yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional. Sehingga untuk pelaksanaan Asesmen Nasional, PKBM Budi Utama Kota Surabaya menumpang ke SMP N 21 Surabaya untuk dapat melaksanakan Asesmen Nasional. Dan dari perencanaan pembiayaan, dalam melaksanakan Asesmen Nasional PKBM Budi Utama menggunakan data pribadi.

Meskipun demikian perencanaan tetap dilakukan oleh PKBM Budi Utama Kota Surabaya dalam mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional. Perencanaan yang baik dan terencana maka akan membawa pada keberhasilan pelaksanaan Asesmen Nasional sesuai dengan perencanaan maksimal yang sudah direncanakan. Persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional telah disebutkan dalam Surat Edaran tentang Asesmen Nasional pasal 5 bahwa “persiapan Asesmen Nasional mencakup: a. Menentukan jadwal melaksanakan, b. Mendata administrasi peserta, c. Menentukan lokasi dilaksanakan, d. Kemilikan sarana prasarana dan SDM yang dimiliki di satuan pendidikan untuk melaksanakan Asesmen Nasional (Kemendikbudristek, 2021). Dalam mengimplementasikan kebijakan Asesmen Nasional perencanaan juga disusun dengan perencanaan alokatif. Menurut (Sudjana, 2004) terdapat sebuah perencanaan alokatif yang meliputi perencanaan berdasarkan perintah (*command planning*), perencanaan berdasarkan kebijakan (*policies planning*), dan perencanaan berdasarkan kepentingan peserta (*participan planning*).

Pertama perencanaan atas dasar perintah (*command planning*) adalah perencanaan yang dilakukan dari penguasa yang dilaksanakan secara kebawah tanpa campur tangan masyarakat, dimana perencanaan itu dilaksanakan oleh PKBM Budi Utama ditujukan pada perencanaan untuk melaksanakan kebijakan Asesmen Nasional yang merupakan perintah dari pemerintah sebagai bentuk evaluasi. Di dalam perencanaan ini mencakup perencanaan sumber daya manusia untuk menjadi panitia pelaksanaan Asesmen Nasional. Hal ini tentunya tidak membutuhkan peserta didik, meskipun dalam pelaksanaan Asesmen Nasional melibatkan peserta didik.

Kedua, perencanaan atas dasar kebijakan (*policies planning*) ialah perencanaan dalam suatu strategi untuk memecahkan masalah yang dihubungkan dengan pengetahuan dan tindakan. Dalam hal ini perencanaan berdasarkan kebijakan dilaksanakan oleh PKBM Budi Utama dalam melaksanakan sebuah kebijakan yaitu Asesmen Nasional. Kebijakan ini diluncurkan untuk menggantikan ujian nasional dan digantikan dengan Asesmen Nasional sebagai tolok ukur keberhasilan lembaga. Perencanaan ini tentu dilaksanakan oleh PKBM Budi Utama sesuai dengan POS yang sudah ada sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Ketiga, perencanaan yang dilaksanakan atas kepentingan peserta (*participant planning*) merupakan perencanaan yang dalam implikasinya sesuai dengan pemodelan sebagai upaya peserta didik untuk memahami materi dalam mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional. Hal itu ditujukan oleh PKBM Budi Utama bahwa peserta didik membutuhkan model pembelajaran yang mudah untuk dipahami dan penuntasan materi sebagai bentuk persiapan peserta didik melaksanakan Asesmen Nasional. Setelah itu tutor diberikan bekal dan pemahaman mengenai pelaksanaan

Asesmen Nasional agar dapat menciptakan lingkungan belajar dan mampu mengejar ketertinggalan materi sehingga peserta didik dapat melaksanakan Asesmen Nasional dengan lancar.

2) Tahap Pengorganisasian

Pengorganisasian ialah salah satu fungsi yang terdapat dalam sebuah sistem manajemen. Pengorganisasian ini dapat dikatakan sebagai urat nadi dalam sebuah lembaga yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu lembaga baik menjalankan program atau lainnya. Terry dalam (Sudjana, 2004) poros dari sebuah manajemen merupakan pengorganisasian dimana hal itu dilaksanakan dengan membagi sumber daya untuk mencapai tujuan yang dapat terlaksana dengan baik Terry dalam Sudjana menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah dasar dari kegiatan manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Sudjana, 2004). Pengorganisasian yang dilakukan oleh PKBM Budi Utama dalam mengimplementasikan kebijakan Asesmen Nasional mencakup:

- a. Pengorganisasian PKBM Budi Utama dengan membentuk panitia berdasarkan atas tanggung jawab dan tugas yang akan dijalankan dari setiap bagian untuk mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional. Pelaksanaan pengorganisasian pada PKBM Budi Utama berjalan sesuai dengan tugas pokok yang ditentukan sesuai tupoksi untuk mempersiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional.
- b. Pembagian panitia pelaksanaan Asesmen Nasional di PKBM Budi Utama meliputi tenaga proktor, tenaga teknis, dan pengawas. Dan tugas-tugasnya telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional 2021.
- c. Pengelolaan tugas panitia memiliki tanggung jawab penuh untuk keberlangsungan pelaksanaan Asesmen Nasional. Tugas-tugas yang dilaksanakan juga harus sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) dalam pelaksanaan Asesmen Nasional..

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya PKBM Budi Utama harus dapat membangun sebuah kebiasaan yang baik dengan diselimuti jalinan kekeluargaan serta ditunjang dengan komunikasi yang sangat bersahabat. Sebelum memulai pelaksanaan juga melaksanakan koordinasi dengan doa bersma untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepercayaan sehingga pelaksanaan Asesmen Nasional akan berjalan dengan baik dan mewarnai PKBM Budi Utama.

3) Tahap Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut terdapat beberapa bentuk pelaksanaan kegiatan untuk dapat mendorong dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan Asesmen Nasional, yaitu pelaksanaan yang dibagi menjadi pelaksanaan sebelum dan pelaksanaan pada saat hari pelaksanaan Asesmen Nasional. Untuk pelaksanaan sebelum melaksanakan kebijakan asesmen nasional seperti mengerjakan ketertinggalan materi dijadwalkan dan dirancang secara fleksibel namun untuk mengimput dan mempersiapkan segala kebutuhan dapat dirancang dan ditentukan waktu yang cepat.

Pelaksanaan Asesmen Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan
Persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional meliputi tahap proktor memastikan kembali data peserta, mensetting data-data di *website* ANBK, mendownload keperluan ANBK, menyiapkan ruangan ANBK, dan mensetting *IP address* setiap peserta.
- b. Keperluan ANBK
Keperluan pelaksanaan Asesmen Nasional seperti aplikasi Exambro proktor yang berguna untuk mengatur keperluan ANBK, Aplikasi Exambro peserta yang berguna untuk mengakses soal-soal Asesmen Nasional oleh peserta didik, kabel LAN dan HUB yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer server dengan peserta, internet untuk mensinkronisasi dan melihat token saat Asesmen Nasional berlangsung, mendownload kartu peserta pelaksanaan Asesmen Nasional, dan melihat *update* terbaru informasi ANBK.
- c. Menjelang pelaksanaan Asesmen Nasional
Kegiatan menjelang pelaksanaan Asesmen Nasional yaitu memastikan kembali kesiapan alat yang dibutuhkan seperti exambro server dan peserta, memastikan semua terkoneksi, memastikan semua tersinkronisasi sesuai jadwal yang ada di *website* ANBK, membackup data

yang tersinkron, membagikan kartu *login* peserta, dan memastikan kehadiran peserta yang akan melaksanakan Asesmen Nasional.

d. Hari pelaksanaan Asesmen Nasional

Berbagai kegiatan di hari pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yaitu *login* pada *website* ANBK kurang lebih 1 jam sebelum pelaksanaan, selalu memantau informasi pelaksanaan Asesmen Nasional terbaru, *login* ke exambro admin sesuai dengan petunjuk pada *website* ANBK, mengikuti prosedur pelaksanaan seperti mengatur sesi dalam mengerjakan Asesmen Nasional, atur aktivasi peserta untuk *login* di exambro peserta, dan mengisi berita acara, daftar hadir serta lain-lain di *website* ANBK.

Pelaksanaan Asesmen Nasional oleh PKBM Budi Utama Kota Surabaya dapat digunakan untuk meningkatkan mutu sehingga akan meningkatkan keunggulan lembaga.

4) Tahap Pengawasan

Untuk menentukan standar yang akan diraih, mendapatkan evaluasi dari hasil sebuah rencana dan dapat diambil keputusan untuk dijadikan bahan revisi jika terdapat kekurangan merupakan definisi dari pengawasan (Renna E., Mahardika, & Riyanto, 2020). Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga PKBM Budi Utama dilakukan dengan memeriksa secara detail mulai dari persiapan hingga penyediaan segala keperluan pelaksanaan Asesmen Nasional demi suksesnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu pengawasan oleh PKBM Budi Utama dilakukan mulai dari keterampilan tenaga proktor dan teknisi hingga ketersediaan jaringan maupun instalansi lainnya

Pengawasan oleh PKBM Budi Utama Kota Surabaya dalam pelaksanaan Asesmen Nasional dilaksanakan oleh pihak lembaga sendiri, pengawas ujian yang bertugas serta dari Dinas Pendidikan. Dari pihak lembaga ikut terjun langsung dalam memonitoring pada proses pelaksanaan Asesmen Nasional sehingga dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Kemudian untuk pengawas ujian melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan Asesmen Nasional sesuai dengan tugasnya yang sudah diatur dalam POS Asesmen Nasional. Sedangkan untuk pengawasan dari Dinas Pendidikan melakukan pengawasan atau monitoring untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan kebermanfaatan pelaksanaan Asesmen Nasional. Pengawasan terlaksana juga karena adanya evaluasi dari berbagai pihak dan dalam hal tersut ditemukan faktor penghambat pelaksanaan Asesmen Nasional, namun tidak ada masalah yang sangat serius sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Proses evaluasi ini bisa menjadi tolok ukur keberhasilan PKBM Budi Utama Kota Surabaya sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan Asesmen Nasional di tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan kebijakan Asesmen Nasional terdapat faktor pendukung di PKBM Budi Utama Kota Surabaya mencakup Nasional di PKBM Budi Utama Kota Surabaya yaitu mencakup: 1) Sumber daya manusia yang memadai, 2) Orang tua/wali peserta didik yang kooperatif, dan 3) Pemanfaatan dana pribadi untuk kepentingan lembaga. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Asesmen Nasional di PKBM Budi Utama Kota Surabaya yaitu mencakup: 1) Belum memiliki sarana komputer untuk melaksanakan Asesmen Nasional, 2) Jumlah soal Asesmen Nasional yang banyak, 3) Keadaan pandemi yang menyebabkan efek keterbatasan gerak, dan 4) Materi yang diujikan berasal dari semua disiplin ilmu berbentuk soal dengan cara berpikir tinggi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan PKBM Budi Utama Kota Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan Asesmen Nasional dilaksanakan dengan sistematis dengan menerapkan perencanaan alokatif. Beberapa langkah perencanaan PKBM Budi Utama dalam mengimplementasikan kebijakan Asesmen Nasional mengacu pada beberapa aspek, yaitu tujuan, sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan AN yang bermula dari hasil keputusan SE Permendikbudristek No.17 dan POS serta kemudian menyusun rencana dan langkah-langkah untuk mengimplementasikan kebijakan AN dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki.
- 2) Pengorganisasian PKBM Budi Utama telah dilakukan dengan baik dan terstruktur berdasarkan tanggung jawab dan wewenang pada setiap bagian yang telah ditetapkan tugasnya. Selain itu PKBM Budi Utama juga telah melakukan pengalokasian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing, proktor ditanggung jawabkan pada operator sekolah, tenaga teknis oleh waka kurikulum dan pengawas diserahkan pada tenaga pendidik yang bertugas.

- 3) Pelaksanaan asesmen nasional telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan Asesmen Nasional. Pelaksanaan Asesmen Nasional dimulai dari persiapan hingga penyediaan kebutuhan demi menyukseskan pelaksanaan kebijakan Asesmen Nasional.
- 4) Pengawasan oleh PKBM Budi Utama fokus pada pelaksanaan Asesmen Nasional agar berjalan sesuai dengan POS dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pengawasan pelaksanaan Asesmen Nasional dilakukan oleh pihak internal (Direktur PKBM) dan oleh pihak eksternal (Panitia dari Dinas Pendidikan).

Daftar Rujukan

- Fitri, A. Z., & Haryanti, N. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif Mixed Method, dan Research and Development)*. Malang: Madani Media.
- Kemendikbudristek. (2021). *Kebijakan Ujian Sekolah dan Asesmen Nasional Tahun 2022*. Indonesia: Permendikbud.
- Machali, I., & Hamid, N. (2017). *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam, (Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Pendidikan Islam)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Moleong, L. J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novita, N. (2021). Asesmen Nasional: Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 174.
- Novita, N., Mellyzar, & Herizal. (2021). Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 172-173.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Bab XVI. Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Dan 59*. Indonesia: Pemerintah Indonesia.
- Ranupandojo, H. (1996). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Renna E., Mahardika, D., & Riyanto, Y. (2020). Manajemen dalam Akreditasi di Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5.
- Sangadji, E., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sudjana. (2004). *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan SDM*. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wildan, A. (2022). Implementasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19-20.